

DARI KABUPATEN MENJADI KOTA: PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT KOTA KENDARI, 1959-1995

Oleh:

Hikmah¹, Faika Burhan², Hamuni³, Salebaran⁴, Halijah Koso⁵

^{1,2,4,5}Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo

³Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Halu Oleo

(Email korespondensi: faikaburhan85@uhu.ac.id)

Abstract

This research examines the socio-economic changes in Kendari City from a regency to a city from 1959 to 1995. This research uses a historical method with several stages: topic selection, heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The research results indicate several things. First, based on Government Regulation No. 32 of 1952, the Kendari District, also part of the Laiwoi autonomous government, was incorporated into the Southeast Sulawesi Level II region, centred in Bau-Bau. In 1964, through Law No. 2/1964, Southeast Sulawesi Province was declared independent, with Kendari as its capital. The change in Kendari's status from a regency to a city certainly met the requirements. The change in Kendari's status from a regency to a city was driven by several factors, including economic and financial capacity, the vast area with the potential to support the lives of its people, and the dense population and ongoing government stability. Second, the population of Kendari City consists of various groups, ethnicities, and subcultures, each with its own distinct interests and needs.

Keywords: Change, Socioeconomics, Kendari City

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang perubahan kehidupan sosial ekonomi Kota Kendari dari kabupaten menjadi kota, 1959-1995. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang memiliki beberapa tahapan yakni; pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan beberapa hal, *Pertama*, berdasarkan PP No. 32 tahun 1952 Kewedanan Kendari yang juga merupakan daerah Pemerintahan *swapraja* Laiwoi tergabung dalam daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara yang berpusat di Bau-Bau. Pada tahun 1964 melalui peraturan UU Nomor 2/1964 Provinsi Sulawesi Tenggara dinyatakan berdiri sendiri dengan ibu kota Kendari. Perubahan status Kendari dari kabupaten menjadi kota seperti sekarang tentunya telah memenuhi persyaratan. Perubahan status wilayah Kendari yang awalnya merupakan kabupaten menjadi kota dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan dalam ekonomi serta keuangan, luasnya wilayah yang berpotensi untuk mendukung kehidupan masyarakatnya, serta jumlah penduduk yang padat dan stabilitas roda pemerintahan yang terus berjalan. *Kedua*, penduduk Kota Kendari terdiri dari berbagai golongan serta bermacam-macam etnis dan sub kultur yang mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula.

Kata Kunci: Perubahan, Sosial Ekonomi, Kota Kendari

1. PENDAHULUAN

Sejarah kota-kota di Indonesia sebagian besar berkembang di wilayah pantai. Hal ini dikarenakan oleh aktivitas ekonomi, budaya, politik, dan sosial banyak dilakukan melalui laut pada masa lalu. Sejarah membuktikan bahwa perdagangan paling ramai dan mudah dilakukan adalah melalui sungai dan laut. Akibatnya muncul permukiman-permukiman di sekitar sungai dan pantai. Permukiman itu pada perkembangannya berubah menjadi kota seiring dengan adanya interaksi antara

penduduk asli dengan pendatang setelah melalui waktu yang cukup lama. Hal ini dapat dilihat dari dinamika suku yang mendiami kota dengan kepentingan yang lebih kompleks (Rabani, 2010). Pada dasarnya kelahiran suatu kota melalui proses sejarah yang panjang dengan memperlihatkan perkembangan dan perubahan baik pada kondisi fisik maupun nonfisik. Perubahan fisik kota dapat dilihat pada bangunan dan perkampungan lama masyarakat, sementara perubahan nonfisik kota dapat dilihat pada perkembangan ekonomi dan politik masyarakat kota (Bintaro, 1977).

Berita pertama tentang Kota Kendari ditulis oleh JN Vosmaer yang mengunjungi Kota Kendari untuk pertama kalinya pada 9 Mei 1831 dan membuat peta Teluk Kendari untuk pertama kalinya. Sejak itu Teluk Kendari terkenal dengan nama Vosmaer's baai. Vosmaer kemudian mendirikan *lodge* (loji) di Kendari bagian utara tepi teluk pantai. Pada saat kedatangan Vosmaer pusat permukiman di Teluk Kendari adalah Kendari. Di sebelah barat teluk arah ke darat terdapat Lepo-lepo. Raja Laiwui (Lakino Konawe) Tebau bertempat tinggal di aliran Lepo-lepo. "Kota" Kendari terletak di sisi utara teluk tidak jauh dari pintu masuk. Kota ini rupanya terbagi dua yaitu di sisi timur muara sungai Kendari dan di sebelah tanjung kecil di sebelah barat muara. Di atas perbukitan tanjung itulah Vosmaer dikunjungi oleh Tebau (Raja Laiwui) dan ia menjanjikan untuk membangun sebuah rumah untuk raja pada tahun berikutnya. Janji itu kemudian ditepati (Chalik, 1984).

Kota Kendari yang bermula dari pemukiman nelayan tumbuh menjadi pusat perdagangan di daerah sekitarnya. Kondisi ini ditunjang oleh Kendari yang terletak di teluk, sehingga daerah ini dipilih menjadi tempat pelabuhan kapal-kapal yang berlayar di bagian timur Sulawesi karena aman dari gelombang. Kota Kendari menjadi ramai dikunjungi dan berkembang permukiman-permukiman baru. Para pedagang terutama orang Bugis dan Makassar mulai ramai mengunjungi daerah ini, sedangkan Belanda yang dipimpin oleh J.N. Vosmaer membangun gedung yang disebut *Lodge* (loji) di depan kantor administrator pelabuhan sekarang sebagai tempat perkantoran (Fariki, 2011).

Penduduk yang mendiami Kota Kendari sejak dari awal dihuni beberapa kelompok etnis. Sudah tentu setiap kelompok etnis mempunyai lapisan sosial masing-masing. Namun, jika dilihat dari segi motivasi yang mendorong mereka untuk bermukim di Teluk Kendari, maka ikatan lapisan sosial tradisionalnya dari setiap kelompok etnis akan mengalami perubahan dari sistem lapisan tradisional dari daerah asalnya. Selain itu, interaksi antarkelompok etnis tersebut akan memengaruhi sistem lapisan sosial dalam kota (teluk) Kendari (Chalik, 1984).

Kondisi sosial masyarakat Kota Kendari pada saat ini berbeda dengan masyarakat dahulu sebelum menjadi kota. Kendari masih berstatus kabupaten, masyarakatnya masih kental dengan kegiatan goton-royong, dan saling membantu misalnya dalam acara pernikahan, proses pembangunan rumah, atau tempat tinggal masyarakat, memanen hasil pertanian, sedangkan kondisi sosial Kendari ketika menjadi kota mengalami perubahan. Masyarakat Kota Kendari mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing, dan kurang berinisiatif untuk membantu sesama.

Keadaan masyarakat Kendari saat menjadi kabupaten dan setelah menjadi kota mengalami perubahan. Masyarakat kota dicirikan dengan pemenuhan kebutuhan primer menggunakan alat-alat modern, sedangkan masyarakat kabupaten dicirikan dengan pemenuhan kebutuhan primer menggunakan peralatan yang tradisional. Untuk itu, kajian tentang 'Dari Kabupaten Menjadi Kota: Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat di Kota Kendari, 1959-1995' perlu dilakukan untuk mengetahui kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kendari.

Batasan temporal penelitian tahun 1959-1995. Tahun 1959 ditetapkan sebagai batasan awal karena pada tahun tersebut Kendari telah ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Daerah Tk II. Batasan akhir tahun 1995, karena Kendari menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara dengan status sebagai Kota Madya. Batasan spasial penelitian ini adalah Kota Kendari. Untuk mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini memiliki beberapa permasalahan yakni, perubahan Kabupaten Kendari menjadi Kota Kendari, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kendari dari kabupaten menjadi kota.

Penelitian ini menggunakan beberapa konsep untuk menganalisis permasalahan yang ada. *Pertama*, konsep perubahan sosial. Menurut Lohn Lewis dan Jon Philip Gillin, perubahan adalah suatu variasi dari cara-cara hidup yang disebabkan oleh perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya penemuan dalam masyarakat. Pendapat lain disampaikan Soekanto (1990) bahwa ada kondisi sosial primer yang menyebabkan terjadinya perubahan, misalnya kondisi-kondisi ekonomi, teknologi, geografis, biologis yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada aspek-aspek kehidupan sosial lainnya. Meski demikian ia lebih menekankan pada kondisi teknologi, serta hubungan antara kondisi dan faktor-faktor perubahan sosial.

Kedua, konsep ekonomi. Menurut Bames (1962) ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat bisa mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Di sebagian besar masyarakat, sumber daya tidak dialokasikan oleh sebuah pelaku perencana tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi yang terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan. Dengan demikian, para pelaku ekonomi sesungguhnya mempelajari bagaimana orang-orang membuat berbagai macam keputusan mulai dari seberapa banyak mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

Ketiga, konsep pemerintah. Menurut Pamudji (1985) bahwa, sistem pemerintahan dapat diartikan sebagai seluruh perangkat unsur-unsur atau bagian yang saling tergantung di antara yang lain, di mana di dalamnya dilaksanakan segala urusan yang berkaitan dengan kepentingan negara atau daerah. Selanjutnya, menurut Busroh (1990), terdapat tiga jenis sistem pemerintahan; 1) bentuk pemerintahan yang menunjukkan hubungan erat antara eksekutif dengan parlemen. Eksekutif yang dipimpin oleh seorang perdana menteri kemudian dibentuk oleh parlemen dari partai atau organisasi yang mayoritas di parlemen; 2) bentuk pemerintahan yang secara tegas memisahkan badan legislatif (parlemen) dengan eksekutif dan juga badan yudikatif. Bentuk pemerintahan seperti ini dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala eksekutif; 3) bentuk pemerintahan badan legislatif di mana dalam sistem ini parlemen tunduk kepada kontrol langsung dari rakyat.

Sebelum penulis melakukan penelitian tentang perubahan sosial ekonomi masyarakat Kota Kendari, telah ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, Muliadi (2002) menulis penelitian berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Lombe di Kecamatan Gu Kabupaten Buton (1945-1997)”. Hasil penelitian Muliadi menyimpulkan bahwa perubahan sosial ekonomi tersebut membawa dampak yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Lombe, yaitu: dampak positif antara lain: tidak adanya gap atau jurang pemisah di kalangan masyarakat sebagai akibat dari sistem pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat Lombe; semakin terbukanya kesempatan dan peluang bagi masyarakat Lombe untuk menentukan arah dan tujuan hidupnya dalam hal ini mengenai mata pencaharian, dan terjadinya pemerataan hasil pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat Lombe. Adapun dampak negatifnya yakni hilangnya sebagian nilai-nilai budaya masa lampau karena bertentangan dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat Lombe, serta semakin ketatnya persaingan dan kompetisi dalam bidang usaha yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial dalam masyarakatnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Febrianti Arnis T., (2024) berjudul “Perkembangan Sosial Ekonomi Transmigran Lombok di Desa Soloy Agung Kecamatan Kulisu Barat Kabupaten Buton Utara: 1994-2018”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedatangan transmigran Lombok (Nusa Tenggara Barat) di kawasan Soloy Agung terjadi pada tahun 1994. Pada tahun tersebut mereka mulai menetap dan resmi menempati rumah-rumah bantuan yang sudah disediakan Pemerintah Daerah. Terdapat dua alasan mengapa mereka bertransmigrasi di Desa Soloy Agung. Pertama, faktor pendorong transmigran Lombok berpindah dari daerahnya adalah faktor ekonomi dan lapangan kerja di wilayahnya yang kurang menguntungkan bagi keberlangsungan hidup. Kedua, faktor penariknya adalah potensi alam di kawasan Soloy Agung cukup memungkinkan untuk menjamin

keberlangsungan hidup ekonominya. Soloy Agung yang memiliki dataran rendah dan tanah subur sangat potensial untuk dikembangkan sebagai lahan bertani ataupun berkebun.

Ketiga, penelitian tentang Lambusa yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan (2011), dalam penelitian berjudul “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Desa Lambusa Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan (1978-2009)”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan sosial ekonomi dalam peningkatan kehidupan Masyarakat. Terdapat pula perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan taraf hidup. Masyarakat mulai sadar akan potensi alam tempat tinggal mereka. Penelitian-penelitian relevan di atas menjadi acuan peneliti untuk melihat dan memahami pola perubahan sosial masyarakat. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yakni penelitian ini lebih banyak membahas tentang penyebab terjadinya perubahan sosial ekonomi dan bentuk-bentuk perubahan sosial ekonomi masyarakat multikultur di Kota Kendari.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan Juni-Agustus 2023. Selain itu, penelusuran sumber telah dilakukan di Kantor Perpustakaan dan Badan Arsip Daerah Sulawesi Tenggara, Perpustakaan Universitas Halu Oleo, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian sejarah sosial. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan multidimensional. Menurut Kartodirdjo (1993) pendekatan multidimensional adalah sebuah pendekatan untuk menjelaskan permasalahan penelitian dengan berbagai macam aspek atau dimensi. Pendekatan multidimensional digunakan karena permasalahan pada penelitian ini mencangkup berbagai aspek, misalnya aspek sosial, dan ekonomi masyarakat Kendari saat menjadi kabupaten dan setelah menjadi kota.

Penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber yaitu; *Pertama*, sumber tertulis yaitu sumber data yang diperoleh dalam bentuk SK, arsip, buku, laporan, dan hasil penelitian yang relevan. *Kedua*, sumber lisan yaitu sumber data yang diperoleh dengan cara wawancara di lokasi penelitian seperti wawancara dengan masyarakat Kendari. *Ketiga*, sumber visual yaitu data yang diperoleh bersumber dari hasil pengamatan secara langsung mengenai sejarah masyarakat yang ada di Kota Kendari, serta pendokumentasian dalam bentuk foto-foto. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sejarah yang disampaikan oleh Kuntowijoyo (2013) dengan memiliki beberapa tahapan yaitu; *Pertama*, pemilihan topik dapat dilakukan berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. *Kedua*, heuristik sumber melakukan pencarian sumber berupa sumber tertulis, sumber lisan, dan sumber visual yang relevan dengan pokok permasalahan. *Ketiga*, verifikasi sumber dilakukan pada sumber tertulis, lisan, dan visual untuk memperoleh data yang autentik dan kredibel. *Keempat*, interpretasi dilakukan setelah menemukan data yang memiliki keaslian dan kebenaran untuk diuraikan dan disatukan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. *Kelima*, historiografi adalah kegiatan penulisan sejarah secara sistematis dan kronologis berdasarkan data yang telah diverifikasi dan diinterpretasi.

3. PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Kota Kendari

Wilayah Kota Kendari dengan ibukota Kendari sekaligus juga sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tenggara secara geografis terletak di bagian selatan Garis Khatulistiwa. Kendari berada di antara $3^{\circ}54'30''$ - $4^{\circ}3'11''$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara $122^{\circ}23'$ - $122^{\circ}39'$ Bujur Timur. Wilayah Kendari terletak di jazirah tenggara Sulawesi mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau yaitu Pulau Bungkutoko. Luas wilayah Kendari $295,2828 \text{ km}^2$ atau 0,70 persen dari luas daratan Sulawesi Tenggara. Batas wilayah Kendari terdiri atas: sebelah utara berbatasan dengan Soropia dan Sampara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda, sebelah selatan

berbatasan dengan Moramo, dan sebelah barat berbatasan dengan Konda dan Ranomeeto (Masie dkk 2007:125).

Wilayah Kota Kendari dulunya meliputi dua kerajaan besar yakni Kerajaan Konawe (sekarang meliputi: Kota Kendari, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan) dan Kerajaan Mekongga (sekarang meliputi: Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara). Kota Kendari ialah nama yang diidentikkan dengan sistem penataan permukiman yang diceritakan yakni diawali dengan terbentuknya Teluk Kendari menjadi daerah pangkalan perdagangan (Hafid, 2006: 3).

3.2 Latar Belakang Perubahan Status Kendari dari Kabupaten Menjadi Kota, 1959-1995

Secara garis besar sosial kemasyarakatan, wilayah kabupaten yang akan dimekarkan menjadi wilayah kota harus sudah mencerminkan karakteristik kota seperti, (1) Wilayahnya lebih sempit daripada kabupaten, (2) Wilayah kota umumnya kawasan perkotaan, (3) Tingkat kepadatan penduduk cenderung tinggi, (4) Mata pencaharian penduduk di bidang industri, bisnis, jasa, perbankan, dan atau pariwisata, (5) Pusat pemerintahan kota menjadi satu dengan wilayah kota. Sementara itu, syarat teknis yang harus dipenuhi agar terjadi perubahan status dari kabupaten menjadi kota terdapat pada Pasal 6 PP 78/2007 yang terdiri dari (1) Faktor kemampuan ekonomi dan keuangan, (2) Luas dan potensi daerah, (3) Kondisi sosial budaya dan politik, (4) Kependudukan, (5) Pertahanan dan Keamanan, (6) Tingkat kesejahteraan masyarakat, dan (7) Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain itu, syarat fisik kewilayahan juga harus terpenuhi untuk terealisasinya perubahan status tersebut (Pasal 7 PP 78/2007) yang meliputi (1) Cakupan wilayah, (2) Lokasi calon ibukota, (3) Sarana dan prasarana pemerintahan. Cakupan wilayah mengatur bahwa wilayah kabupaten paling sedikit terdiri dari 5 (lima) kecamatan, sedangkan wilayah kota paling sedikit terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Pembahasan secara birokrasi pembentukan wilayah kabupaten menjadi wilayah kota melewati proses yang cukup panjang dengan mempertimbangkan berbagai faktor dan urgenitas seperti halnya perubahan Kendari dari statusnya sebagai kabupaten yang berubah menjadi kota.

Berdasarkan PP No. 32 tahun 1952 Kewedanan Kendari yang juga merupakan daerah Pemerintahan *swapraja* Laiwoi tergabung dalam daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara yang berpusat di Bau-Bau. Daerah Tingkat II Sulawesi Tenggara menetapkan anggota-anggota DPRDS yang berjumlah 23 orang. Pada tahun 1964 melalui peraturan UU Nomor 2/1964 Sulawesi Tenggara berdiri sendiri dengan Ibukota Kendari. Kota Kendari yang dikenal pula dengan sebutan Kota Bertakwa rupanya sebelum ditetapkan melalui UU nomor 6 Tahun 1995, tanggal 27 September 1995 lalu merupakan Kota Madya Daerah Tingkat II Kendari (Melamba, 2013). Perubahan status Kendari dari Kabupaten menjadi Kota seperti sekarang tentunya telah memenuhi persyaratan dan telah disepakati oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kelayakan perubahan status tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Kemampuan Ekonomi dan Keuangan

Faktor ekonomi merupakan salah satu syarat apabila suatu wilayah akan berubah status misalnya dari kabupaten menjadi wilayah kota. Kendari yang pada saat itu masih berstatus kabupaten merupakan pusat perputaran ekonomi di Sulawesi Tenggara. Perubahan status administratif Kendari dari kabupaten ke kota pada dasarnya memang dilatarbelakangi oleh kondisi perekonomiannya yang dinilai layak. Keterangan tersebut juga disampaikan oleh Masyhur Masie Abunawawas bahwa:

“Perubahan status Kabupaten Kendari menjadi Kota Kendari ditinjau dari segi ekonomi sudah masuk kategori layak dinaikkan statusnya sebagai wilayah kota. Penilaianya mengenai kelayakan perekonomian Kabupaten Kendari dilihat dari berbagai aspek yang dapat menjadi penunjang” (Wawancara, 14 Oktober 2023).

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, dapat dilihat bahwa kemampuan ekonomi dan keuangan Kabupaten Kendari dilihat dari berbagai aspek sehingga berdasarkan penilaian sudah layak menjadi wilayah kota. Meskipun berbicara sumber daya alam seperti pertanian ataupun pertambangan masih tergolong kurang, Kendari mengembangkan bidang jasa dengan melihat kebutuhan masyarakat.

Hal yang sama disampaikan Zayat K., yang mengatakan bahwa:

“Wilayah Kendari ini pada saat masih jadi kabupaten itu sebenarnya masih banyak yang bisa diolah, contohnya seperti persawahan itu masih banyak di bagian Konawe. Pada saat jadi kota, otomatiskan wilayahnya juga semakin kecil dan wilayah yang terkenal dengan persawahannya mekar juga menjadi kabupaten sendiri, jadi menurut kacamata saya yang sekarang dapat dan banyak dikelola itu dari sektor jasa saja yang menonjol” (Wawancara, 12 September 2023).

Dari keterangan tersebut dapat dilihat bahwa wilayah Kendari pada dasarnya tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai lahan pertanian dikarenakan faktor kepadatan perumahan penduduk. Kondisi tersebut membuat masyarakat Kendari mayoritas berkecimpung dalam bidang jasa. Selain dalam bidang jasa, Kendari juga merupakan wilayah yang strategis bagi investor untuk menjalankan bisnis seperti mendirikan pusat-pusat perbelanjaan.

Ditinjau dari segi ekonomi, Kota Kendari tergolong memiliki letak yang strategis. Hal ini berkenaan dengan letak Kendari yang dilalui jalur transportasi. Jalur tersebut dapat menjangkau daerah-daerah pusat perekonomian di Provinsi Sulawesi Tenggara bahkan daerah-daerah yang menjadi pusat perekonomian di luar. Jalur transportasi ini meliputi darat dan laut. Kendari juga dikenal sebagai Kota Pelabuhan dengan keberadaan Teluk Kendari yang strategis.

Corak kegiatan ekonomi Kendari tidak mengandalkan bidang pertanian, meskipun masih terdapat beberapa lokasi yang dapat dikelola untuk menjadi lahan pertanian. Sebagai gambaran produksi pertanian di Kendari sejak menjadi Kota sampai tahun 1995 terdiri dari; Produksi padi (244,61 Ton), jagung (391,64 Ton), ubi kayu (3.394,74 Ton) dan kacang tanah (7,25 Ton). Tercatat pada tahun 1995, pendapatan perkapita penduduk Kendari sebesar Rp1.413.123 (Hafid, 2006).

Wilayah Kendari juga memiliki potensi pada bidang pariwisata baik itu wisata bahari, wisata sejarah berupa situs-situs peninggalan Belanda dan Jepang, dan juga wisata religi di mana Kendari dikenal dengan julukan Kota Bertakwa. Hal inipun disampaikan La Fariki yang mengatakan bahwa:

“Selain jasa, wilayah Kendari juga dikenal sebagai tempat wisata baik itu wisata sejarah, wisata religi dan objek-objek wisata seperti tempat-tempat permandian itu bisa dimaksimalkan oleh pemerintah supaya bisa dilihat oleh orang-orang baik lokal maupun non lokal” (Wawancara, 10 Oktober 2023).

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa wilayah Kendari juga dikenal dengan objek-objek wisatanya. Objek wisata tersebut tidak hanya mengundang pengunjung lokal, tetapi sampai mancanegara yang tentunya juga ikut memberikan dampak bagi pendapatan daerah Kendari itu sendiri. Berlandaskan penilaian inilah yang menjadi salah satu persyaratan kenaikan status wilayah Kendari.

3.2.2 Luas dan Potensi Daerah

Ciri pokok pertumbuhan Kota Kendari pada kurun waktu tersebut adalah terbentuknya Kabupaten (Daerah Otonom Tingkat II) Kendari. Pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959. Saat itu Sulawesi secara keseluruhannya merupakan satu provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi. Setahun kemudian ditetapkan Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 yang membagi Sulawesi menjadi dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara-Tengah, dan Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara. Posisi Kendari pada saat itu adalah ibu kota Kabupaten Kendari.

Di dalam usaha untuk mewujudkan fungsi kota sebagai pusat pemerintahan, dibutuhkan inventarisasi segala kegiatan pemerintahan di Kota Kendari, dan dikelompokkan dalam suatu areal kegiatan yang sama. Keuntungan dalam pembentukan kawasan ini adalah efisiensi dari jarak dan waktu yang dibutuhkan untuk saling berinteraksi. Pada pola pengelompokan yang direncanakan, terdapatlah hal khusus dimana aktivitas tertentu perlu untuk dialokasikan pada ruang kegiatan yang berdekatan misalkan pada sektor pelabuhan laut, pelabuhan udara, dan sebagainya. Dengan dipindahkannya pusat kota ke Desa Mandonga, sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah daerah, maka telah ditetapkan lokasi kawasan pemerintahan. Usaha selanjutnya yang dilakukan adalah mendukung setiap kegiatan pembangunan serta mengarahkan sesuai dengan perencanaan yang telah ada, sehingga setiap kegiatan yang akan berlangsung di kawasan pemerintahan benar-benar telah sesuai serta memiliki keteraturan yang dikehendaki.

Kendari pada awal menjadi kabupaten, terdiri dari tujuh wilayah kecamatan antara lain yaitu Kecamatan Kendari, Kecamatan Lasolo, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Wua-Wua, Kecamatan Lambuya dan Kecamatan Wawonii. Pembentukan ketujuh wilayah kecamatan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara tanggal 19 Desember 1964 Nomor: 2067 A. Setelah Sulawesi Tenggara berhasil mekar sebagai provinsi sendiri dengan ibukotanya di Kendari, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Kendari memutuskan untuk memekarkan ketujuh wilayah kecamatan tersebut menjadi dua belas kecamatan dengan berdasarkan SK Gubernur Nomor: 7 Tanggal 7 Juli 1964 yang bertujuan untuk merealisasikan pemekaran tersebut. Selanjutnya pada tahun 1979, Kabupaten Kendari kembali mekar menjadi 21 kecamatan dengan pembentukan perwakilan kecamatan.

Pembentukan Kota Administratif Kendari terealisasi pada tahun 1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 1978 dengan pertimbangan adanya perkembangan dan kemajuan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara pada umumnya dan wilayah Kendari khususnya. Kecamatan Kendari dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan pemerintah wilayah secara khusus guna menjamin terpenuhinya tuntutan perkembangan dan kemajuan dimaksud sesuai dengan aspirasi masyarakat. Adapun yang menjadi tujuan pembentukan Kota Administratif Kendari tersebut adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasil guna dan berdaya guna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan (PP Republik Indonesia No.19 Tahun 1978).

Potensi Kabupaten Kendari yang terdiri dari 21 Kecamatan dan perwakilan kecamatan tersebut tentunya dapat dilihat dari sektor-sektor sumber daya alam yang terdapat pada beberapa kecamatan tersebut. Sumber daya alam tersebut dapat berupa hasil pertanian serta perkebunan yang cukup melimpah yang diolah sedemikian rupa agar bernilai jual tinggi sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat maupun daerah.

3.3 Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Kota Kendari dari Kabupaten Menjadi Kota, 1959-1995

Seiring berjalananya waktu maka kehidupan sosial ekonomi masyarakat Kendari semakin menunjukkan tingkat mobilitas. Mobilitas yang dimaksud cukup berpengaruh dalam rangka penampakan suasana Kota Kendari. Sektor pendidikan dipengaruhi oleh membanjirnya murid-murid untuk bersekolah di Kendari, baik penduduk dari dalam maupun dari luar Kendari. Yang menonjol bagi penduduk dari luar itu adalah usia sekolah lanjutan (SMTP dan SMTA sekarang). Pada saat itu, di Kendari telah berdiri Sekolah-Sekolah yang setingkat dengan SMTP seperti SMP, SMEP, dan STN, serta yang setingkat dengan SMTA, seperti SMA, SGA, SMEA, dan SKKA. Mulai saat itu terlihat adanya ciri urbanisasi di Kendari, khususnya di kalangan usia sekolah itu. Sementara, sektor ekonomi, dipengaruhi oleh berkembangnya perekonomian rakyat di Pasar Kendari yang tidak hanya dikunjungi oleh penduduk Kendari sendiri, melainkan juga oleh penduduk dari luar Kendari. Di

samping itu mulai berkembang pula perdagangan lokal dan interinsuler melalui pelabuhan laut Kendari (Melamba, 2013).

3.3.1 Kurun Waktu Tahun 1959-1964

Petunjuk pokok tentang pertumbuhan Kota Kendari pada kurun waktu ini adalah terbentuknya Provinsi Sulawesi Tenggara. Pembentukan provinsi ini, tepatnya pada tanggal 27 April 1964, berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan Nomor 2 Tahun 1964 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964. Di dalamnya dinyatakan bahwa ibu kota provinsi ini ditempatkan di Kendari. Dengan demikian, Kendari berkedudukan rangkap, di satu pihak masih tetap sebagai ibu kota Kabupaten Kendari, dan di pihak lain sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini berarti pula bahwa secara administratif status Kendari meningkat, dari pusat pemerintahan kabupaten menjadi pusat pemerintahan provinsi (Hafid, 2006).

Konsekuensi dari status Kendari yang demikian itu melahirkan perencanaan pembangunan agar mencapai perkembangan setara dengan ibu kota-ibu kota provinsi lainnya. Meskipun semua rencana belum terwujud sebagai mana harusnya, akan tetapi yang pasti bahwa perkembangannya telah jauh lebih tinggi dari pada kedua kurun waktu terdahulu.

Pada awal permulaan sampai sekitar pertengahan kurun waktu tersebut (1959-1964), keadaan Kendari sebagai ibukota kabupaten itu belum memperlihatkan kemajuan yang berarti. Faktor yang memengaruhinya, di antaranya adalah belum pulihnya keamanan yang ditimbulkan oleh pemberontakan DI/TII. Suatu upaya yang dapat diwujudkan oleh Pemerintah kabupaten pada tahap permulaan, berkenaan dengan rekonstruksi struktur perwilayahannya, dari bentuk distrik/onder distrik dan kampung menjadi kecamatan dan desa. Dari beberapa kecamatan yang terbentuk sebagai hasil rekonstruksi itu adalah Kecamatan Kendari. Kecamatan ini terletak di ibu kota Kabupaten Kendari, meliputi delapan desa, yaitu: Kendari, Benu-Benua, Mandonga, Lepo-Lepo, Puuwatu, Mata, Gunung Jati dan Abeli. Desa-desa ini terbentuk sebagai hasil pengintegrasian dari beberapa kampung yang telah ada.

Selanjutnya, menjelang berakhirnya kurun waktu tersebut atau pada saat mendekati terbentuknya proklamasi Sulawesi Tenggara (1963-1964), Kendari menampakkan kemajuan bila dibandingkan dengan kurun waktu sebelumnya, di antaranya, yaitu meluasnya lahan perkotaannya dari kurang lebih 2 km menjadi kurang lebih 5 km, adanya perintisan jaring-jaring jalan di pusat kota, meluasnya bangunan-bangunan yang relatif tergolong permanen, baik yang didirikan oleh penduduk setempat seperti perumahan maupun oleh Pemerintah seperti kantor-kantor dan prasarana ekonomi dan sosial budaya; serta meningkatnya mobilitas penduduk khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi.

3.3.2 Kurun Waktu 1964-1980

Perekonomian Kota Kendari pada tahun 1980 tampak sangat bervariasi. Walaupun lapangan usaha serta ciri yang bersifat lapangan usaha pedesaan relatif masih tampak menonjol (39,65%) dengan kegiatan lain, seperti industri dan perdagangan yang terdiri dari lapangan usaha non pertanian seperti bidang jasa (18,72%), perdagangan (12,85%), pemerintahan (10,69%), dan bangunan (7,62%). Kegiatan perdagangan di kota ini relatif menunjukkan adanya perkembangan. Perdagangan yang bertaraf ekspor khususnya jenis komoditi kayu bakau dan kayu rimba dengan tujuan ke Taiwan dan Jepang. Pelabuhan laut Kendari merupakan pelabuhan yang dapat menampung kapal-kapal dagang, baik dari dalam maupun luar negeri. Fasilitas pelabuhan tersebut, terdiri atas satu dermaga pelabuhan laut dan satu dermaga pelabuhan lokal. Adapun cabang pelayaran yang beroperasi di pelabuhan ini, antara lain PT PELNI, PT Sriwijaya Lines, dan dua agen perusahaan lainnya.

Keterangan mengenai jenis-jenis komoditi yang diperdagangkan di Kota Kendari juga disampaikan Anwar Hafid bahwa:

“Jenis komoditi yang diperdagangkan antarpulau adalah hasil-hasil perkebunan (Kopra, kopi biji, cengkeh); hutan (rotan, kayu jati, kayu rimba), dan hasil laut (ikan kering, agar-agar, ekor ikan, teripang, lola, dan japing-japing). Dari jenis komoditi tersebut yang tergolong penting adalah kopra, rotan, kayu rimba, teripang, dan ikan kering” (Wawancara, 23 November 2023).

Perindustrian di Kota Kendari masa itu relatif baru berkembang. Di kota ini terdapat 517 buah industri kecil. Persebaran lokasi industri-industri kecil tersebut relatif belum merata. Khusus pada tahun 1981 dari jumlah industri yang ada, sekitar 71% terdapat di Kecamatan Kendari Kota, 23% di Kecamatan Mandonga, dan sebagiannya berada di Kecamatan Poasia. Penyerapan tenaga kerja, paling banyak (70,5%) berada di Kendari. Pada tahun 1981 seluruh industri kecil tersebut menyerap sebanyak 4.381 orang tenaga kerja. Tenaga kerja yang terkecil (3%) berada di Kecamatan Poasia.

Adapun jenis-jenis industri kecil itu, antara lain industri pertukangan dan mebel, industri batu bata, batako, dan tegel, industri konveksi pakaian, industri perahu motor, industri kuningan, industri rotan, dan reparasi alat-alat elektronik. Berkaitan dengan kegiatan perekonomian ini terdapat beberapa hotel dan penginapan. Hotel dan penginapan itu berjumlah 20 buah dengan kapasitas 175 kamar. Pariwisata kota juga berkembang dengan baik dengan tersedianya Beach Hotel, Amins Hotel, Wisma Wolio, Wisma Resik, dan Wisma Andika. Potensi yang mendukung pengembangan kepariwisataan di daerah ini, selain potensi alam (berupa pantai-pantai yang indah) juga berupa potensi budaya (Melamba, 2013).

3.3.3 Kurun Waktu 1981-1995

Pembangunan lima tahun Kabupaten Kendari adalah pembangunan daerah jangka pendek. Karena itu, dalam perencanaannya selalu memberikan prioritas utama pada program-program rehabilitasi. Program rehabilitasi tercermin dalam proyek-proyek pembangunan yang sasaran utamanya adalah kepemilikan dan peningkatan. Program stabilitas tercermin dalam usaha pembangunan yang sasaran utamanya adalah pembangunan yang dapat segera menambah pasokan barang ke daerah untuk kelancaran perputaran perekonomian masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah menyediakan sarana berupa pasar dan pembangunan pertokoan. Hal serupa disampaikan Masyhur Masie Abunawas bahwa:

“Pencaharian utama penduduk Kendari adalah dengan berdagang dan menjadi nelayan. Para pedagang mengumpulkan barang-barang dagangan dari desa-desa lalu mengangkutnya untuk diperdagangkan di pasar-pasar. Penduduk Kota Kendari terdiri dari berbagai golongan serta bermacam-macam etnis dan sub kultur yang mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula” (Wawancara, 14 Oktober 2023).

Berdasarkan keterangan dari narasumber tersebut dapat diketahui bahwa mata pencaharian masyarakat di Kota Kendari pada dasarnya adalah pedagang dan nelayan. Kondisi penduduk Kota Kendari yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan ras mempunyai keperluan ataupun kebutuhan yang cenderung berbeda. Struktur masyarakat Sulawesi Tenggara dalam hal ini masyarakat Kabupaten Kendari terdiri dari tiga lapisan sosial. Pertama yaitu, kelompok intelektual menjadi kelompok yang menempati kedudukan tertinggi dalam masyarakat. Kedua, adalah kelompok menengah, yang dimana mereka umumnya terdiri dari pegawai rendah sampai menengah, pedagang/pengusaha dan tukang. Ketiga adalah golongan pekerja kasar/buruh.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Dati II Kendari selama tahun 1979-1985 mencapai kenaikan rata-rata sebesar 14,72% setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi sebesar 22,30% terjadi pada tahun 1982 dan terendah sebesar 4,88% terjadi pada tahun 1983. Rendahnya pertumbuhan ekonomi pada tahun 1983 ini disebabkan oleh menurunnya pertumbuhan di sektor pertanian, (sub sektor tanaman pangan dan sub sektor kehutanan) khususnya turunnya produksi ubi kayu, kacang tanah, buah-buahan dan kayu rimba (Hafid, 2006).

Sementara itu, pendapatan regional perkapita yang lazimnya disebut sebagai pendapatan perkapita menurut harga berlaku pada tahun 1985 naik menjadi Rp350.170.84 yang berarti selama kurun waktu tahun 1979-1985 menunjukkan suatu peningkatan rata-rata sebesar 21,77% pertahun. Kenaikan tertinggi 16.21% dicapai pada tahun 1982 dan terendah tahun 1981 -4,11%, sedangkan perkembangan pendapatan regional perkapita selama pelita III sebesar 5,49% pertahun.

Jumlah penduduk Kota Kendari pada tahun 1995 sebanyak 171.987 jiwa, terdapat 87.318 jiwa atau 50,77% di antaranya yang merupakan angkatan kerja yang produktif dengan lapangan usaha yang bervariasi. Mata pencaharian seperti pada bidang pertanian \pm 16.107 jiwa, pada bidang industri \pm 2.500 jiwa, bidang kontruksi \pm 1.700 jiwa, bidang niaga \pm 8.300 jiwa, bidang transportasi \pm 2.000 jiwa dan bidang jasa sosial \pm 40.000 jiwa dan bidang lain-lain \pm 15.000 jiwa. Adapun pendapatan perkapita penduduk Kota Kendari pada tahun 1995 tercatat sebesar Rp1.413.127 (Hafid, 2006).

4. SIMPULAN

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perubahan status Kendari dari kabupaten menjadi kota tentunya telah memenuhi sejumlah persyaratan. Perubahan status wilayah Kendari yang awalnya merupakan kabupaten menjadi kota dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain kemampuan dalam ekonomi serta keuangan, luasnya wilayah yang berpotensi untuk mendukung kehidupan masyarakatnya, serta jumlah penduduk yang padat dan stabilitas roda pemerintahan yang terus berjalan. *Kedua*, penduduk Kota Kendari terdiri dari berbagai golongan serta bermacam-macam etnis dan sub kultur yang mempunyai kepentingan serta kebutuhan yang berbeda-beda pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Bames. 1962. *History Of Historycal Writing*. Dover Publication.
- Bintaro, R. 1977. *Pengantar Geografi Kota*. Yogyakarta: Spring.
- Busroh, A. D. 1990. *Ilmu Negara*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Chalik, H. A. 1984. *Ungkapannya Tradisional yang Berkaitan Dengan Sila-Sila dalam Pancasila Daerah Sulawesi Tenggara*. Depdikbud.
- Fariki, L. 2011. *Menara Persatuan Sultra Identitas dan Penjaga Budaya di Kendari*. Lembaga Diskusi dan Kajian Jurnalistis.
- Hafid, A. 2006. *Sejarah Kota Kendari*. UNHALU.
- Kartodirdjo, S. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kurniawan, Dedi. 2011. *Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Petani di Desa Lambusa Kecamatan Kondan, Kabupaten Konawe Selatan: 1978-2009*. Skripsi.
- Melamba, B. 2013. *Kota Lama Kota Baru Kendari Kajian Sejarah Sosial, Politik, dan Ekonomi*. Padang: Teras.
- Muliadi. 2002. *Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Lombe di Kecamatan Gu, Kabupaten Buton: 1945-1997*. Skripsi
- Pamudji, S. (1985). *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Rabani, L. O. (2010). *Kota-Kota Pantai di Sulawesi Tenggara*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- T, Febrianti Arnis. 2024. Perkembangan Sosial Ekonomi Transmigran Lombok di Desa Soloy Agung Kecamatan Kulisusu Barat Kabupaten Buton Utara: 1994-2018. *Sorume: Jurnal Penelitian*

Sejarah dan Budaya, Volume 2 Nomor 3,
<https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/sorume/article/view/3002>

Wawancara :

Anwar Hafid, 23 November 2023

La Fariki, 10 Oktober 2023

Masyhur Masie Abunawawas, 14 Oktober 2023

Zayat K, 12 September 2023